

ABSTRAK

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum putusan pailit terhadap karyawan perusahaan menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kedudukan karyawan perusahaan menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan apabila perusahaan pailit, pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga terhadap perusahaan yang dipailitkan beserta hambatannya.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Niaga Semarang. Tipe penelitian bahan hukum yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada beserta contoh kasus dan putusannya. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu sebuah metode penelitian dengan mencoba melihat kesesuaian aturan-aturan normatif yaitu Undang-Undang No.37 Tahun 2004 dan juga fakta dilapangan. Akibat hukum putusan pailit terhadap karyawan perusahaan menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Adapun akibat hukum putusan pailit yaitu apabila telah dinyatakan oleh hakim atau Pengadilan Niaga dengan suatu putusan, dalam hal pekerja mengundurkan diri baik status perusahaan dinyatakan pailit maupun tidak, perlu meminta penetapan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan serta pekerja/buruh tidak mendapatkan uang pesangon melainkan hanya uang penggantian hak dan uang pisah.

Sedangkan, jika pekerja/buruh di PHK dengan alasan perusahaan pailit, maka di samping perlu penetapan dari lembaga yang berwenang juga pekerja/buruh memperoleh uang pesangon, uang penghargaan dan hak-hak lainnya. Kedudukan karyawan perusahaan yang pailit termasuk dalam kreditor preferen atau yang didahulukan. Posisi karyawan walaupun diutamakan, tetapi tetap berada dibawah pajak dan biaya-biaya perkara lainnya.

Kata Kunci : Kepailitan, Akibat Kepailitan, dan Tenaga Kerja/Karyawan.

ABSTRACT

Bankruptcy is a process in which a debtor who has financial difficulties to pay his debts is declared bankrupt by the court, in this case the Commercial Court, because the debtor cannot pay his debts, the debtor's assets can be distributed to creditors in accordance with applicable laws and regulations. This study aims to determine the legal consequences of bankruptcy decisions on company employees according to Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, the position of company employees according to Law no. 13 of 2003 concerning Employment if the company goes bankrupt, the implementation of the decision of the Commercial Court against the bankrupt company and its obstacles.

The research was conducted at the Semarang Commercial Court. The type of research on legal materials used is a sociological juridical research method, the author conducts research on existing laws and regulations along with examples of cases and their decisions. The sociological juridical approach method is a research method by trying to see the suitability of the normative rules, namely Law No. 37 of 2004 and also the facts on the ground. The legal consequences of bankruptcy decisions against company employees according to Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. As for the legal consequences of a bankruptcy decision, if it has been declared by a judge or the Commercial Court with a decision, in the event that an employee resigns, whether the company status is declared bankrupt or not, it is necessary to request a determination from a labor dispute settlement institution and the worker/laborer does not receive severance pay, but only compensation. rights and severance pay.

Meanwhile, if the worker/labourer is laid off on the grounds that the company is bankrupt, then in addition to the need for stipulation from the competent authority, the worker/labourer will also receive severance pay, awards and other rights. The position of the bankrupt company's employees is included in the preferred creditor or priority. Even though the position of the employee is prioritized, it is still under taxes and other court costs.

Keywords: Bankruptcy, Consequences of Bankruptcy, and Labor/Employees.